

PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM KETERLIBATAN KORPORASI PADA KEBIJAKAN INOVASI NASIONAL

Oleh

Jopinus Saragih¹, Ahmad Jet Alamin Aldyas², Melisa Nur Asima Sidabutar³, Yohan Purnawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Efarina

Email: jr.saragih68@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi nasional di Kabupaten Simalungun, dengan fokus pada peran dan tantangan yang dihadapi oleh kedua pihak dalam menjalankan kolaborasi untuk pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, perwakilan korporasi, serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Selain itu, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan turut dilakukan untuk memperkaya temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi, khususnya yang bergerak di sektor teknologi dan infrastruktur, memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan inovasi nasional dengan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan infrastruktur. Namun, terdapat tantangan utama terkait perbedaan kepentingan antara sektor publik dan privat, di mana korporasi cenderung lebih fokus pada keuntungan finansial sementara pemerintah daerah memprioritaskan dampak sosial dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas mengenai kolaborasi antara pemerintah dan korporasi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan inovasi yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor korporasi guna mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci: Korporasi; Kebijakan Nasional; Pemerintah Daerah; Ekosistem Inovasi; Pembangunan Daerah.

ABSTRACT

This research aims to examine the involvement of corporations in the national innovation policy in Simalungun Regency, focusing on the roles and challenges faced by both parties in carrying out collaboration for the development of local potential-based innovations. This research used a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews with local government officials, corporate representatives, and communities as policy targets. In addition, field observations and analysis of policy documents were also conducted to enrich the research findings. The results show that corporations, especially those engaged in the technology and infrastructure sectors, have an important role in supporting national innovation policies with significant contributions in capacity building and infrastructure improvement. However, a key challenge is the diverging interests between the public and private sectors, where corporations tend to focus more on financial returns while local

governments prioritize social impact and long-term economic development. In addition, the lack of clear regulations regarding collaboration between government and corporations is an obstacle to optimal innovation policy implementation. This research is expected to provide recommendations to improve cooperation between the local government and the corporate sector to encourage the creation of an inclusive and sustainable innovation ecosystem in Simalungun Regency.

Keywords: *Corporation; National Policy; Local Government; Innovation Ecosystem; Regional Development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia saat ini semakin bergantung pada implementasi kebijakan inovasi yang melibatkan berbagai sektor, baik itu sektor publik maupun sektor privat. Menurut Freeman (1988), kebijakan inovasi tidak hanya mencakup peningkatan kualitas teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menciptakan sinergi antara aktor-aktor ekonomi untuk meningkatkan daya saing negara (Freeman, 1988). Dalam hal ini, keterlibatan sektor korporasi menjadi penting karena mereka memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk mendukung kebijakan inovasi nasional. Inovasi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan inovasi secara efektif, seperti Jepang dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja (Perez, 2002). Di Indonesia, implementasi kebijakan inovasi juga diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Simalungun, yang terletak di Sumatra Utara, memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Potensi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong inovasi berbasis sumber daya alam. Namun, meskipun memiliki potensi besar, Kabupaten Simalungun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Korporasi memiliki peran penting dalam kebijakan inovasi karena mereka dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi, infrastruktur, dan kapasitas manusia. Menurut Schumpeter (1934), inovasi sering kali berasal dari sektor privat, terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk melakukan riset dan pengembangan (Schumpeter, 1934). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan korporasi sangat penting untuk menciptakan inovasi yang dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang.

Namun, keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi seringkali terkendala oleh beberapa faktor. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan sektor privat. Pemerintah cenderung fokus pada dampak sosial dan pembangunan jangka panjang, sementara korporasi lebih fokus pada keuntungan jangka pendek (Tidd et al., 2005). Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam implementasi kebijakan inovasi yang

melibatkan kedua pihak. Koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah dan sektor korporasi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan inovasi. Menurut Mulgan (2007), koordinasi yang efektif antara sektor publik dan sektor privat sangat penting dalam menciptakan inovasi yang berdampak luas (Mulgan, 2007). Di Kabupaten Simalungun, ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan korporasi sering menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan inovasi yang sudah disusun.

Kebijakan inovasi nasional Indonesia, yang telah diatur dalam berbagai regulasi dan program pemerintah, mencakup aspek-aspek seperti riset dan pengembangan, peningkatan kapasitas teknologi, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, dalam konteks daerah seperti Kabupaten Simalungun, kebijakan nasional seringkali tidak sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya lokal, kapasitas teknis, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Studi kasus di Kabupaten Simalungun mengungkapkan bahwa meskipun terdapat niat baik dari pemerintah untuk mendorong inovasi, faktor-faktor seperti ketidakjelasan regulasi dan kurangnya dukungan dari korporasi lokal menjadi kendala utama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan inovasi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan yang solid dengan sektor privat (Freeman & Perez, 1988). Untuk mendorong keberhasilan kebijakan inovasi, penting bagi pemerintah daerah dan sektor korporasi untuk membangun sinergi yang lebih baik. Freeman (1988) menyarankan agar pemerintah menciptakan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi kerjasama antara sektor publik dan sektor privat, sehingga kedua pihak dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan inovasi (Freeman, 1988).

Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Simalungun adalah menyusun regulasi yang jelas mengenai kerjasama antara pemerintah dan korporasi. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpastian yang sering dihadapi oleh korporasi dalam berinvestasi dalam kebijakan inovasi. Dengan regulasi yang jelas, korporasi akan merasa lebih aman untuk berinvestasi dan terlibat dalam program-program inovasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Menurut Tidd et al. (2005), pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korporasi, akademisi, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem inovasi yang saling mendukung (Tidd et al., 2005). Hal ini termasuk menyediakan insentif bagi korporasi untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, kebijakan fiskal yang mendukung, dan potensi pasar yang tersedia di daerah tersebut. Menurut Schumpeter (1934), korporasi cenderung berinvestasi dalam inovasi jika mereka melihat adanya peluang pasar yang menguntungkan dan adanya kebijakan yang mendukung kegiatan riset dan pengembangan (Schumpeter,

1934). Selain faktor internal, korporasi juga menghadapi hambatan eksternal dalam melaksanakan kebijakan inovasi. Hambatan ini meliputi ketidakstabilan politik, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendukung, agar korporasi tertarik untuk berpartisipasi dalam kebijakan inovasi yang dijalankan. Salah satu aspek penting dalam kebijakan inovasi adalah pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Freeman (1988), peningkatan kapasitas SDM di tingkat lokal dapat mempercepat proses adopsi teknologi baru dan inovasi yang diperkenalkan oleh sektor korporasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Simalungun untuk bekerja sama dengan universitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat setempat.

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam kebijakan inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki infrastruktur teknologi dan komunikasi yang baik cenderung lebih sukses dalam menerapkan kebijakan inovasi (Perez, 2002). Di Kabupaten Simalungun, pembangunan infrastruktur berbasis teknologi menjadi prioritas untuk mendukung inovasi yang melibatkan sektor korporasi. Selain kerjasama dengan korporasi, penting juga bagi pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses inovasi. Hal ini akan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di beberapa daerah lain di Indonesia, telah terjadi keberhasilan dalam implementasi kebijakan inovasi yang melibatkan korporasi. Misalnya, di Kota Bandung, pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem informasi yang mempermudah pelayanan publik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, kebijakan inovasi dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi di Kabupaten Simalungun, disarankan agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih mendukung dan mendorong partisipasi sektor privat. Hal ini termasuk memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan adil bagi korporasi yang terlibat dalam program inovasi. Kerjasama antara sektor publik dan swasta adalah kunci untuk menciptakan inovasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Mulgan (2007), pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan yang kondusif bagi sektor privat untuk berkembang dan berinovasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memfasilitasi kerjasama ini dengan menciptakan kebijakan yang mendukung. Rumusan Masalah Penelitian ini yaitu 1) Apa saja tantangan yang dihadapi korporasi dalam berpartisipasi aktif dalam kebijakan inovasi nasional di daerah ini? 2) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi keterlibatan korporasi dalam ekosistem inovasi? 3) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam

pengembangan inovasi berbasis potensi lokal? 4) Bagaimana model sinergi ideal antara korporasi, pemerintah, dan lembaga riset dalam mendorong ekosistem inovasi yang inklusif di Kabupaten Simalungun?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai makna, persepsi, dan dinamika hubungan antaraktor yang terlibat dalam kebijakan inovasi di Kabupaten Simalungun, khususnya antara korporasi dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana kolaborasi antara kedua sektor ini berlangsung dalam konteks kebijakan inovasi nasional dan daerah. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Simalungun, yang terletak di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Simalungun juga merupakan wilayah yang berkembang dengan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi, baik di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, maupun pengolahan hasil pertanian. Pemilihan informan akan dilakukan secara purposive atau berdasarkan tujuan dan relevansi peran serta pengetahuan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Informan yang dipilih harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai kebijakan inovasi, kolaborasi antara pemerintah daerah dan korporasi, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi di Kabupaten Simalungun, serta dinamika hubungan antara sektor swasta dan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Inovasi Nasional di Daerah (Simalungun)

Implementasi kebijakan inovasi nasional di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun, merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan inovasi nasional, seperti Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, sinergi antar aktor, dan pemahaman terhadap pentingnya inovasi. Kebijakan inovasi nasional di Indonesia umumnya menekankan pada penguatan kapasitas riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing daerah melalui inovasi. Di tingkat daerah, kebijakan ini seharusnya terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), serta program-program kerja tahunan pemerintah daerah. Di Kabupaten Simalungun, meskipun ada upaya untuk

mengintegrasikan kebijakan inovasi nasional dalam berbagai dokumen perencanaan, implementasinya masih terbatas.

Berdasarkan temuan awal, RPJMD Kabupaten Simalungun dan Renstra sektor terkait, seperti Dinas Perindustrian, Bappeda, dan Dinas Litbang, memang memuat program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas inovasi. Namun, integrasi kebijakan inovasi ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik nyata, khususnya dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pengalokasian anggaran yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Turunan Kebijakan Inovasi di Kabupaten Simalungun, sebagai upaya untuk menindaklanjuti kebijakan inovasi nasional, pemerintah Kabupaten Simalungun perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki turunan konkret yang terintegrasi dalam program-program daerah. Misalnya, dalam RPJMD Simalungun, sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan industri perlu memiliki program berbasis inovasi yang mengarah pada peningkatan kualitas produk lokal dan daya saing daerah.

Namun, sejauh ini, kebijakan inovasi yang termuat dalam dokumen tersebut lebih bersifat umum dan kurang mengarah pada praksis teknis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan kebijakan inovasi nasional yang lebih konkrit di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daya saing daerah. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Implementasi Inovasi di Simalungun. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan inovasi di Kabupaten Simalungun. Di antara faktor penghambat utama adalah:

- a. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia): Minimnya jumlah dan kualitas SDM yang terlatih dalam riset dan inovasi menjadi salah satu hambatan utama. Tanpa keahlian teknis yang memadai, sulit bagi pemerintah daerah untuk mendorong inovasi yang bersifat praktis dan aplikatif.
- b. Keterbatasan Anggaran: Pembiayaan untuk program inovasi sering kali menjadi kendala, terutama mengingat anggaran daerah yang terbatas dan lebih banyak digunakan untuk program rutin.
- c. Komitmen Politik yang Terbatas: Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pihak legislatif, kebijakan inovasi cenderung menjadi proyek sampingan yang tidak mendapat perhatian cukup.
- d. Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan membuat implementasi kebijakan inovasi menjadi tidak terkoordinasi dengan baik.

Sebaliknya, ada juga faktor pendorong yang dapat mempercepat implementasi inovasi, yaitu:

- a. Keinginan untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah: Program inovasi yang berfokus pada pengembangan industri lokal dan pemberdayaan UMKM berbasis teknologi dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Simalungun, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan manufaktur.
- b. Keterlibatan Aktor Eksternal: Kerja sama dengan universitas, peneliti, dan korporasi besar dapat membuka peluang untuk transfer teknologi dan pengembangan inovasi yang aplikatif untuk daerah.

Beberapa contoh program inovasi daerah yang sudah berjalan di Kabupaten Simalungun antara lain adalah kerja sama dengan universitas untuk penelitian berbasis kebutuhan lokal, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan teknologi dan pemasaran digital. Misalnya, program inovasi berbasis teknologi yang didorong oleh beberapa industri besar di sektor perkebunan untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Namun, kolaborasi sektor swasta dan publik masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program tersebut.

Sebagai contoh konkret, beberapa perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Simalungun, seperti Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet, telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan produk berbasis inovasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program-program ini, meskipun bernilai positif, belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan inovasi daerah secara struktural.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Keterlibatan Korporasi

Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi keterlibatan sektor swasta, termasuk korporasi, dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Simalungun, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Untuk mendukung keterlibatan korporasi, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan berbagai inisiatif dan regulasi yang memberikan insentif atau kemudahan bagi korporasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan daerah melalui inovasi dan tanggung jawab sosial (CSR).

Inisiatif dan Regulasi Daerah yang Mendukung Keterlibatan Sektor Swasta, Salah satu langkah awal yang perlu diambil pemerintah daerah adalah pembuatan kebijakan insentif yang menarik bagi sektor swasta, termasuk korporasi besar. Di Kabupaten Simalungun, meskipun ada beberapa inisiatif untuk menarik investasi dan mendorong inovasi, kebijakan tersebut masih terbatas dan cenderung kurang terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan perizinan dan insentif pajak bagi perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam sektor inovasi belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Namun, ada beberapa contoh regulasi daerah yang mendukung keterlibatan sektor

swasta, misalnya kebijakan insentif bagi perusahaan yang mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan atau inovasi berbasis teknologi. Pemkab Simalungun dapat memperkuat kebijakan ini dengan mempermudah proses perizinan untuk perusahaan yang ingin melakukan inovasi dalam bidang produksi, riset, atau pengembangan produk berbasis teknologi.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat membentuk forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta (model Triple Helix). Forum semacam ini dapat memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi, dan mengidentifikasi peluang sinergi dalam mendorong kebijakan inovasi. Beberapa inisiatif seperti program akselerasi UMKM berbasis teknologi, atau workshop inovasi daerah yang melibatkan korporasi, juga dapat menjadi contoh kegiatan yang mendukung keterlibatan sektor swasta. Komunikasi dan Kemitraan antara Pemerintah dan Korporasi Aktivitas komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan korporasi di Kabupaten Simalungun cenderung bersifat reaktif dan lebih fokus pada program CSR tradisional daripada mendorong kolaborasi inovatif. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan program-program inovasi daerah yang lebih struktural dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, peran pemerintah kabupaten seharusnya lebih proaktif dalam menciptakan kemitraan strategis dengan sektor swasta. Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan perusahaan dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset untuk menciptakan inovasi berbasis riset dan teknologi. Namun, sejauh ini, komunikasi yang terjalin lebih bersifat ad-hoc, terbatas pada beberapa sektor yang sudah terbiasa menjalankan program CSR, dan lebih berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) daripada pada inisiatif inovasi kolaboratif. Hambatan Struktural dalam Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Korporasi. Beberapa hambatan struktural yang menghambat keterlibatan sektor swasta dalam inovasi di Kabupaten Simalungun antara lain:

- a. Birokrasi yang Kompleks: Proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi penghalang utama bagi perusahaan untuk berkolaborasi dalam program inovasi. Prosedur yang tidak jelas atau terlalu rumit sering kali membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi dalam proyek berbasis inovasi, karena mereka harus menghadapi ketidakpastian dan biaya yang tinggi dalam memperoleh izin yang diperlukan.
- b. Tidak Ada Lembaga Penghubung yang Efektif: Di Kabupaten Simalungun, belum ada lembaga atau platform formal yang bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan sektor swasta dalam hal pengembangan inovasi. Sebagai contoh, meskipun ada beberapa lembaga yang menangani pembangunan ekonomi dan perizinan, belum ada organisasi yang khusus menangani kolaborasi inovatif antara perusahaan dan pemerintah daerah.

- c. **Tumpang Tindih Kewenangan:** Dalam beberapa kasus, kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah kabupaten dan provinsi menghambat implementasi kebijakan inovasi. Misalnya, kebijakan yang menyangkut pembangunan industri berbasis teknologi di tingkat daerah sering kali bergantung pada keputusan yang harus diambil di tingkat provinsi, yang dapat memperlambat implementasi kebijakan tersebut.

Contoh Kasus: Keterlibatan Korporasi dalam CSR dan Inovasi Kolaboratif Di Kabupaten Simalungun, sebagian besar keterlibatan korporasi masih terfokus pada program CSR tradisional. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan perkebunan besar di wilayah ini seringkali menjalankan program CSR yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau peningkatan infrastruktur dasar, namun tidak banyak yang bergerak ke arah program inovasi berbasis kolaborasi sektor swasta dan pemerintah. Sebagian besar program CSR lebih berorientasi pada penanggulangan kemiskinan atau pembangunan sosial, bukan pada pengembangan inovasi berbasis teknologi. Namun, ada juga beberapa contoh yang lebih positif, seperti kerja sama antara perusahaan manufaktur dengan perguruan tinggi lokal untuk mengembangkan produk berbasis teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Meskipun demikian, kolaborasi semacam ini masih tergolong terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Simalungun, meskipun sudah memiliki beberapa kebijakan yang mendukung keterlibatan sektor swasta, sejauh ini masih cenderung reaktif daripada proaktif dalam membangun kolaborasi inovasi. Korporasi lebih banyak terlibat dalam program CSR tradisional yang tidak terkait langsung dengan inovasi daerah. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan struktural, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menciptakan platform kolaborasi yang lebih formal agar korporasi dapat lebih aktif dalam mendorong inovasi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

3. Strategi Meningkatkan Keterlibatan Korporasi dalam Inovasi Berbasis Potensi Lokal

Inovasi berbasis potensi lokal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Bagi Kabupaten Simalungun, pertanian, pariwisata, dan agroindustri adalah sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Dalam konteks ini, korporasi dapat memainkan peran krusial dalam mendukung riset, pengembangan produk lokal, serta mendorong inovasi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi yang dapat mengoptimalkan keterlibatan korporasi dalam mengembangkan sektor-sektor potensial ini. Potensi Lokal yang Bisa Dikembangkan Melalui Inovasi:

- 1) Pertanian dan Agroindustri

Kabupaten Simalungun dikenal memiliki sektor pertanian yang cukup besar, dengan produk unggulan seperti kopi, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Produk-produk ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui inovasi dalam proses pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Sebagai contoh, inovasi dalam pengolahan kopi lokal untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya di pasar global, atau pengembangan sawit organik yang ramah lingkungan, dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Korporasi, terutama perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, bisa didorong untuk berinvestasi dalam riset untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi berbasis teknologi. Hal ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk memperbaiki sistem irigasi, mengurangi penggunaan pestisida, atau mengoptimalkan proses pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2) Pariwisata

Kabupaten Simalungun juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, dengan berbagai destinasi alam dan budaya yang dapat dijadikan daya tarik. Inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya lokal, dan digitalisasi promosi pariwisata menjadi kunci untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Korporasi yang bergerak dalam industri pariwisata atau teknologi bisa berperan dalam membangun platform digital, mempromosikan destinasi lokal, serta mengembangkan produk wisata berbasis inovasi.

Sebagai contoh, pengembangan aplikasi pariwisata berbasis lokasi yang dapat mengarahkan wisatawan ke destinasi-destinasi di Simalungun, serta memberikan informasi tentang budaya lokal, makanan khas, dan penawaran produk lokal, bisa meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

Peran Korporasi dalam Mendukung Riset dan Pengembangan Produk Lokal. Korporasi, terutama yang memiliki sumber daya besar, teknologi canggih, dan pengalaman dalam riset, dapat memainkan peran kunci dalam mendukung riset dan pengembangan produk lokal. Dalam konteks Kabupaten Simalungun, perusahaan-perusahaan agroindustri atau yang bergerak di bidang pengolahan produk lokal dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau lembaga pendidikan untuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah produk. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kopi dapat mendukung penelitian untuk mengembangkan varietas kopi unggulan, atau teknologi pengolahan yang dapat mempertahankan cita rasa kopi asli Simalungun. Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dapat berkolaborasi dengan lembaga riset untuk mengembangkan produk olahan yang lebih bernilai dan ramah lingkungan.

Strategi yang Meningkatkan Keterlibatan Korporasi dalam Inovasi. Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan beberapa strategi penting untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam inovasi berbasis potensi lokal, sebagai

berikut:

1. Pelibatan Korporasi Sejak Perencanaan Salah satu strategi utama adalah melibatkan korporasi sejak tahap perencanaan program atau kebijakan inovasi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengundang perusahaan-perusahaan terkait untuk menjadi bagian dari forum perencanaan kebijakan yang membahas pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pertanian, agroindustri, dan pariwisata. Dengan demikian, korporasi dapat memberikan masukan langsung mengenai tantangan dan peluang yang mereka lihat di lapangan, serta mempercepat implementasi program inovasi berbasis teknologi.
2. Pembentukan Forum Multipihak Pembentukan forum multipihak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, korporasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat memperkuat koordinasi dan mendorong kerja sama yang lebih efektif dalam mengembangkan produk lokal. Forum ini bisa menjadi tempat diskusi mengenai inovasi yang dibutuhkan di sektor pertanian atau pariwisata, serta mencari solusi atas hambatan yang ada dalam proses pengembangan produk lokal.
3. Pemberian Insentif Fiskal Untuk mendorong korporasi lebih aktif dalam mendukung inovasi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak daerah atau pajak penghasilan, bagi perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan produk berbasis teknologi atau riset. Insentif ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi sambil mendorong mereka untuk berinvestasi dalam program inovasi yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Penciptaan Ruang Inkubasi Pemerintah daerah juga dapat membangun ruang inkubasi bagi para pelaku usaha lokal dan korporasi untuk mengembangkan produk berbasis inovasi. Inkubasi ini bisa melibatkan akses ke teknologi, pendampingan bisnis, dan pembiayaan bagi UMKM yang berpotensi mengembangkan produk lokal berbasis teknologi. Dengan adanya ruang inkubasi ini, korporasi bisa berkolaborasi dengan startup atau UMKM lokal untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sebagai contoh konkret, korporasi bisa didorong untuk mendukung inovasi berbasis potensi lokal seperti pengolahan kopi atau sawit organik melalui beberapa strategi insentif. Pemerintah daerah bisa menawarkan insentif pajak untuk perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan produk kopi organik atau sawit yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat menjalin kemitraan branding bersama dengan perusahaan untuk mempromosikan produk lokal ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Branding bersama ini bisa menambah nilai jual produk lokal, serta meningkatkan kesadaran pasar terhadap produk unggulan dari Kabupaten Simalungun.

Strategi untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam inovasi berbasis potensi

lokal di Kabupaten Simalungun membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal. Dengan melibatkan korporasi sejak tahap perencanaan, membentuk forum multipihak, memberikan insentif fiskal, dan menciptakan ruang inkubasi, diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan produk berbasis inovasi yang akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam kebijakan inovasi nasional di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, namun terdapat potensi besar untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan lembaga riset. Beberapa temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Inovasi Nasional di Kabupaten Simalungun: Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan inovasi nasional seperti Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), implementasi kebijakan inovasi di tingkat Kabupaten Simalungun masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sinergi lintas sektor, keterbatasan pemahaman aktor lokal tentang urgensi inovasi, dan kurangnya kebijakan yang secara langsung mendorong inovasi di tingkat daerah.
2. Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Simalungun cenderung lebih bersifat reaktif daripada proaktif dalam membangun kolaborasi inovasi dengan sektor swasta. Meskipun ada upaya dalam menyediakan insentif kebijakan dan memfasilitasi program CSR, namun kolaborasi inovasi yang melibatkan sektor swasta dan lembaga riset masih terbatas dan belum sepenuhnya terkoordinasi.
3. Keterlibatan Korporasi: Korporasi di Kabupaten Simalungun, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan manufaktur, lebih banyak terlibat dalam program CSR tradisional yang kurang berorientasi pada inovasi. Kemitraan antara korporasi dan pemerintah lebih banyak difokuskan pada kegiatan sosial daripada pada program inovasi kolaboratif yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi pengembangan ekonomi daerah.
4. Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Korporasi: Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu meningkatkan kemitraan dengan korporasi melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan semua pihak terkait. Keterlibatan korporasi dalam inovasi berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian dan pariwisata, dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar.
5. Model Sinergi Ideal: Berdasarkan temuan dari wawancara dengan informan, model sinergi yang ideal antara pemerintah, korporasi, dan lembaga riset harus berlandaskan pada kejelasan peran, keberlanjutan, dan keberpihakan terhadap potensi lokal.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, korporasi sebagai motor penggerak inovasi, dan lembaga riset serta perguruan tinggi sebagai pencipta pengetahuan dan teknologi yang aplikatif.

6. Strategi Peningkatan Keterlibatan Korporasi: Diperlukan strategi konkret untuk mendorong korporasi agar lebih aktif dalam inovasi berbasis potensi lokal. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain adalah pelibatan korporasi sejak perencanaan, pembentukan forum multipihak, pemberian insentif pajak daerah, dan penciptaan ruang inkubasi untuk mendukung riset dan pengembangan produk lokal.

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah daerah, korporasi, dan lembaga riset merupakan faktor kunci dalam mendorong inovasi berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. Meskipun tantangan masih ada, dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Kabupaten Simalungun dapat menjadi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui inovasi kolaboratif yang melibatkan semua sektor terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, C. (1988). Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour. In G. Dosi et al. (Eds.), *Technical Change and Economic Theory* (pp. 38-66). London: Pinter Publishers.
- Perez, C. (2002). *Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages*. Edward Elgar Publishing.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market, and Organizational Change*. John Wiley & Sons.
- Mulgan, G. (2007). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press.
- Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). *Managing innovation: Integrating technological, market, and organizational change*. Wiley.
- Kemenristek Dikti. (2020). *Rencana aksi nasional kebijakan inovasi Indonesia*.
- Freeman, C., & Perez, C. (2002). *Technological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages*. Edward Elgar Publishing.
- Mulgan, G. (2007). *Social innovation: What it is, why it matters, and how it can be accelerated*. The Young Foundation.
- Rabelotti, R. (2004). Industrial Districts and International Competitiveness: A Comparative Analysis of Sectors in Italy and Argentina. *The Journal of Development Studies*, 41(4), 612-634.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2019). The Role of Local Government in Regional Innovation Systems. *Regional Studies*, 53(6), 867-876.
- McKinsey & Company (2020). *Governance and Innovation in Local Governments*. McKinsey & Company.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- World Bank. (2019). *Decentralization and Innovation in Local Governance: A Global Perspective*. World Bank Publications.
- Ofori, G. (2016). Public-private Partnerships and the Role of Government. *International Journal of Project Management*, 34(1), 1-12.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2019). The Role of Local Government in Regional Innovation Systems. *Regional Studies*, 53(6), 867-876.
- McKinsey & Company. (2020). *Governance and Innovation in Local Governments*. McKinsey & Company.
- World Bank. (2019). *Public-Private Partnerships for Infrastructure Development in Emerging Markets*. World Bank Publications.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2020). *Sumatera Utara dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Industri Pengolahan di Indonesia*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Simalungun. (2019). *Laporan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Simalungun*. Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)*. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory*. SAGE Publications.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2020). *Sumatera Utara dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Pemerintah Kabupaten Simalungun. (2019). *Laporan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Simalungun*. Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)*. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Bernard, H. R. (2011). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). AltaMira Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Sundram, S. (2014). *Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 125-140.
- Bappeda Kabupaten Simalungun. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Asosiasi Perusahaan Indonesia. (2021). *Peran Korporasi dalam Pengembangan Inovasi di Daerah*. Jakarta: API.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123.
- Wahyuni, D., & Sutrisno, B. (2018). Implementasi kebijakan inovasi di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 231-245